



KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Rencana Strategis

Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2020-2024

Daftar Isi

Daftar Isi	i
Pengantar	ii
Latar Belakang	1
Pendahuluan	1
Kerangka Kesuksesan Sekretariat Jenderal	3
Tujuan Sekretariat Jenderal	3
Fokus Kesuksesan Sekretariat Jenderal	4
Kerangka Kesuksesan Sekretariat Jenderal	5
Struktur Organisasi	11
Kerangka Kelembagaan Setjen	11
Gambaran Unit-unit Kerja di bawah Setjen	13
Kerangka Pendanaan	16
Penutup	17

Pengantar



Prof. Ainun Na'im, MBA, Ph.D.

Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia

**“Our goals can only be reached
through the vehicle of plan”**

Pablo Picasso

Sejalan dengan perumpamaan tersebut, perencanaan dapat diartikan sebagai alat atau wahana untuk mencapai tujuan. Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Tahun 2020-2024 merupakan wahana Sekretariat Jenderal (Setjen) untuk mencapai salah satu tujuan Kemendikbud yaitu “Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel. Tujuan tersebut sejalan dengan misi Kemendikbud ketiga yaitu “Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan” serta selaras dengan salah satu misi Presiden untuk “Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya”.

Perubahan cara kerja Kemendikbud terus menerus dilakukan untuk mewujudkan tata kelola, pelayanan yang inovatif dan prima serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan dan kebudayaan. Pendekatan yang digunakan Setjen yaitu mengubah budaya birokrasi konvensional menuju birokrasi yang modern dengan organisasi yang lebih lincah (agile) dengan memanfaatkan teknologi, informasi dan komunikasi.

Renstra Setjen ini diharapkan menjadi rujukan seluruh unit kerja di bawah lingkungan Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk dapat mengimplementasikan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan secara terarah dan terukur melalui sinergi dan kolaborasi, sehingga tujuan dapat tercapai.

Pendahuluan

Latar Belakang

Sejalan dengan regulasi tentang anggaran sektor pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN, anggaran sektor pendidikan terus tumbuh melebihi 35% selama lima tahun terakhir. Besar anggaran ini terefleksi dengan jumlah penerima layanan Kemendikbud yang lebih dari 70 juta orang, baik sebagai peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan ataupun administrasi.

Tetapi, belanja sektor pendidikan ini didominasi belanja transfer daerah, sebesar 63%. Sementara anggaran Kemendikbud (dan termasuk pendidikan tinggi) terus menurun, dari 23% di tahun 2016 – menjadi 15% di tahun 2020.

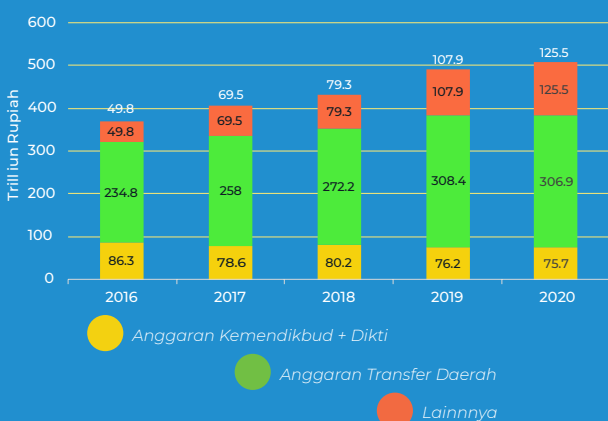
Kondisi ini tidak mengurangi peran strategis Sekretariat Jenderal. Dengan semakin dominannya belanja transfer daerah, fungsi koordinasi Sekretariat Jenderal menjadi semakin penting.

Setjen harus mengembangkan kolaborasi dengan pemerintah daerah, sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan untuk meyakinkan belanja transfer daerah ini dioptimalkan untuk mencapai target pendidikan nasional. Terlebih ketika kebijakan Mendikbud mendorong dana transfer pendidikan disalurkan langsung ke sekolah.

Salah satu peran penting Setjen adalah pengembangan platform digital pendidikan dan penyediaan data informasi pendidikan yang berperan penting dalam perencanaan anggaran transfer daerah dan fungsi pengawalan belanja daerah dan sekolah, dengan mengelola data pokok pendidikan dan mendorong belanja transfer – terutama ke sekolah, yang dilakukan secara non-tunai.

Bagan 1

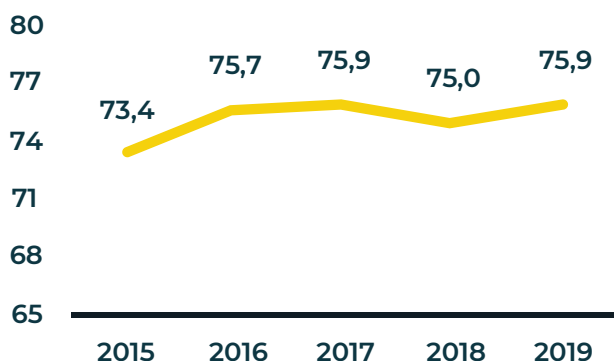
Perkembangan Anggaran Pendidikan dan Anggaran Transfer Daerah Sektor Pendidikan



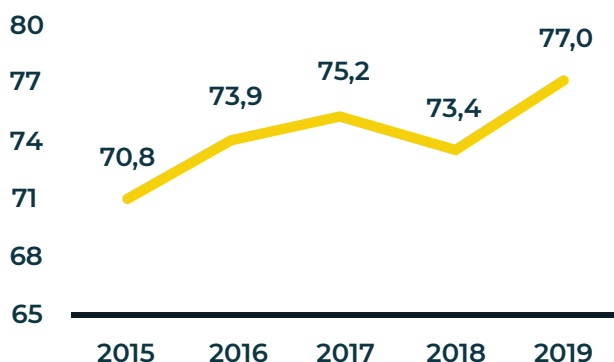
Selain sisi kolaborasi dan pemanfaatan TIK, fungsi utama Setjen adalah dalam penguatan tata kelola. Salah satu poin penting dalam hal ini adalah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Beberapa inisiatif terkait penguatan RBI ini adalah peran kunci Setjen, seperti: deregulasi hukum, pengelolaan SDM profesional berbasis merit, sistem pemerintahan berbasis elektronik, pengelolaan Barang Milik Negara, pelaporan keuangan dan akuntabilitas kinerja.

Perkembangan Reformasi Birokrasi Kemendikbud telah menunjukkan capaian yang menggembirakan. Melihat tren positif skor indeks RBI dan SAKIP Kemendikbud seperti di Bagan 2. Penurunan di tahun 2018 harus menjadi perhatian dan ditindaklanjuti dengan langkah konkret yang harus tercantum dalam renstra Setjen.

SAKIP Kemendikbud



Indeks RBI



Bagan 2

Kinerja SAKIP dan Indeks RBI Kemendikbud

Mengingat besarnya anggaran sektor pendidikan ataupun anggaran belanja pusat Kemendikbud dan besarnya jumlah pemangku kepentingan yang terdampak, maka penting bagi Kemendikbud untuk memperkuat tata kelola, kerja sama dan pemanfaatan teknologi informasi. Untuk itu perlu disusun Renstra Setjen yang dapat menangkap kebutuhan ini dan meyakinkan terwujudnya dukungan Setjen bagi segenap pemangku kepentingan pendidikan di Indonesia.

Kerangka Kesuksesan Sekretariat Jenderal

Tujuan Sekretariat Jenderal

Perpres No. 82 tahun 2019 memberikan mandat kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kemendikbud.

Peningkatan pelayanan publik dan keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan terus diupayakan oleh Sekretariat Jenderal. Beragam

inovasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat terus diupayakan guna membuka ruang keterlibatan masyarakat.

Partisipasi masyarakat penting untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya sebagaimana tertera dalam salah satu misi Presiden atau

Nawa cita kedua. Setjen juga memiliki peranan penting untuk mendukung pelaksanaan transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Sekretariat Jenderal berkomitmen untuk melakukan penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan dan akuntabel

Fokus Kesuksesan Sekretariat Jenderal

Dengan mempertimbangkan tujuan Setjen untuk membentuk sebuah sistem tata kelola Kementerian yang partisipatif, transparan dan akuntabel untuk mendukung transformasi yang berkelanjutan di bidang pendidikan dan kebudayaan melalui keterlibatan para pemangku kepentingan, diperlukan beragam strategi.

Koordinasi dan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan pendidikan yang merata dan berkualitas

Pemberdayaan dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas distribusi anggaran.

Pembiayaan pendidikan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara Indonesia dapat mengenyam pendidikan yang layak

Penumbuhan Karakter untuk mewujudkan pelajar Indonesia sebagai Pelajar Pancasila.

Peningkatan prestasi pelajar Indonesia

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum

Koordinasi dan kolaborasi untuk peningkatan kerja sama pendidikan

2

Penguatan manajemen dan tata kelola yang berkelanjutan untuk meningkatkan good governance

Penerapan mekanisme open government pada seluruh unit kerja

Perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran serta penguatan dan pembinaan akuntabilitas kinerja dengan sistem yang terintegrasi

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi kementerian

Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengelolaan pengadaan barang/jasa

1

Inovasi layanan berbasis Pemanfaatan Teknologi Informasi melalui pengembangan platform digital pendidikan nasional

Mengembangkan sistem informasi yang akurat, terpercaya dan terbaru bagi para pemangku kepentingan untuk peningkatan kualitas layanan

Menghadirkan infrastruktur sekolah/kelas dan kampus masa depan yang menunjang proses belajar mengajar.

3

Kerangka Kesuksesan Sekretariat Jenderal

Kerangka kesuksesan Sekretariat Jenderal ini disusun dengan pendekatan yang mengkombinasikan Top-Down dengan melihat arah kebijakan kementerian dan Sekretaris Jenderal, dan Bottom-Up yang melihat aspirasi dari masing-masing unit kerja. Di bagian ini kedua pendekatan dapat diramu menjadi lima kerangka kesuksesan Setjen.

Kerangka kesuksesan ini tidak dimaksud sebagai

daftar komprehensif dari seluruh program, kegiatan dan indikator pendukung di bawah Setjen. Juga tidak dimaksudkan sebagai daftar yang disusun per unit kerja. Kerangka kesuksesan Setjen lebih dimaksudkan sebagai fokus utama Setjen di lima tahun ke depan, dan bagaimana unit kerja bisa bersinergi dan bekerja sama dalam mendukung tercapainya tujuan Setjen, Kemendikbud dan Rencana Pembangunan Pemerintah di periode 2020-2024.

1

Penguatan tata kelola kementerian melalui upaya mendorong tercapainya Reformasi Birokrasi Internal

Reformasi birokrasi dimaknai sebagai salah satu upaya pembaharuan penyelenggaraan pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance), dan untuk mencapai hal tersebut Setjen selaku unit organisasi Kemendikbud yang memiliki fungsi koordinasi pembinaan dan dukungan administrasi di Kemendikbud perlu memastikan bahwa:

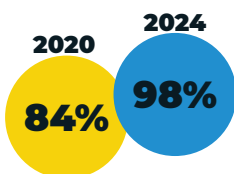
SDM Kemendikbud memiliki integritas yang tinggi, profesional dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya.

Kualitas tata laksana yang efektif, efisien dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

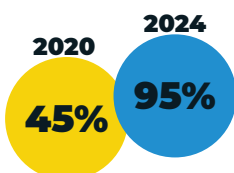
Kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kemendikbud yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan dan bebas KKN.

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1

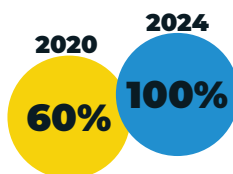
Persentase pegawai dengan tingkat kedisiplinan tinggi



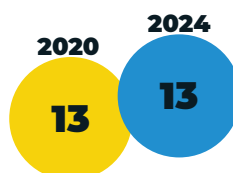
Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal A



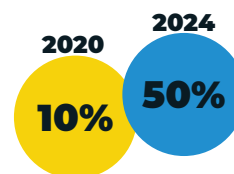
Persentase unit kerja di lingkungan Kemendikbud yang hasil evaluasi organisasinya efektif



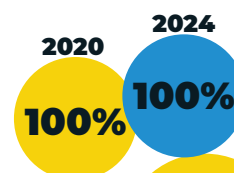
Jumlah laporan keuangan yang disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)



Persentase jumlah satker yang mengimplementasikan sistem naskah dinas elektronik



Persentase masalah hukum, kasus, dan perkara yang ditangani di lingkungan Kemendikbud



Strategi Fokus Kesuksesan 1

Dalam rangka meningkatkan kedisiplinan pegawai Kemendikbud untuk mendorong ketercapaian Reformasi Birokrasi, Biro Sumder Daya Manusia (Biro SDM) bersama Pusat pendidikan dan pelatihan pegawai mengembangkan assessment center serta talent pool SDM yang dapat mendorong terwujudnya SDM Kemendikbud yang berintegritas tinggi, profesional

dan kompeten berdasarkan sistem merit sesuai bidang tugasnya.

Selain penguatan SDM, penguatan tata kelola Kementerian juga perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk peningkatan kualitas tata laksana diantaranya:

Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa (Biro Umum dan PBJ) mengembangkan sistem persuratan dan kearsipan berbasis teknologi guna memberikan layanan pengelolaan persuratan dan kearsipan yang efektif dan efisien. Hal ini juga didukung oleh Pusat teknologi informasi dan komunikasi pendidikan (Pusadtin) yang mengembangkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Selain itu, sebuah sistem informasi pendukung dengan pendekatan Single Sign On (SSO) untuk perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan juga dikembangkan oleh Biro Perencanaan untuk meningkatkan kualitas layanan penganggaran, evaluasi dan pelaporan akuntabilitas kinerja Kementerian.

Peningkatan Kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan untuk pendidikan yang merata dan berkualitas

2

Sinergi dan kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan terutama pemerintah pusat dan daerah menjadi satu hal yang penting guna memastikan bahwa layanan pendidikan berkualitas dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, oleh karena itu Setjen perlu memastikan:

Efektivitas dan efisiensi kebijakan, program dan anggaran Kemendikbud serta anggaran transfer daerah bidang pendidikan dan kebudayaan

Penyebarluasan informasi program kebijakan Kemendikbud kepada masyarakat luas

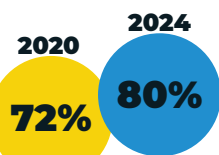
Peningkatan kerja sama dalam dan luar negeri melalui diplomasi bidang pendidikan dan kebudayaan

Penggunaan data sebagai bahan pengambilan kebijakan

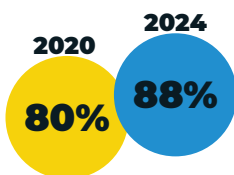
Penguatan dukungan kepada Layanan Lembaga pendidikan tinggi swasta

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 2

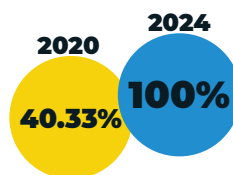
Persentase pemanfaatan anggaran DAK bidang pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan capaian output



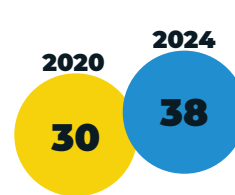
Persentase peningkatan akses dan kualitas informasi dan publikasi program/kebijakan prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang disampaikan melalui media



Persentase integritas data prioritas (standar, metadata, referensi)



Jumlah satuan pendidikan yang dijadikan model dalam pengembangan pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ) di Asia Tenggara



Strategi Fokus Kesuksesan 2

Salah satu fokus Setjen melalui Biro Perencanaan yaitu membangun kolaborasi bersama pemerintah daerah dan mitra pembangunan dalam menyusun kebijakan strategis bidang pendidikan dan kebudayaan agar semakin tepat sasaran dan berdampak. Hal ini menjadi tantangan yang cukup besar sehingga diperlukan partisipasi dan kolaborasi baik internal Kemendikbud, antar K/L terkait hingga pemerintah daerah. Sebuah sistem terpadu dikembangkan untuk memastikan

alokasi DAK dan pemanfaatannya dapat berjalan secara maksimal.

Selain itu, kolaborasi dengan mitra pendidikan diperlukan dalam pengelolaan dan pendayagunaan data pendidikan, bahasa dan kebudayaan. Pusdatin melakukan banyak kolaborasi dengan pihak luar seperti (TVRI, TV Lokal, RRI dan operator telekomunikasi) untuk mengakselerasi program-program pembelajaran berbasis digital.

3

Inovasi layanan pendidikan dan kebudayaan berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi

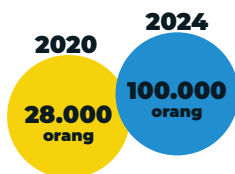
Dunia pendidikan sangat erat dengan teknologi, oleh karena itu Setjen berupaya untuk menghadirkan inovasi layanan yang berbasis pemanfaatan teknologi informasi salah satunya adalah melalui pengembangan platform digital pendidikan nasional. Berikut beberapa hal lainnya terkait pemanfaatan teknologi informasi:

- Peningkatan pemanfaatan platform digital untuk mendukung layanan pendidikan.

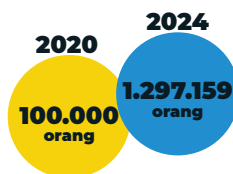
- Pemanfaatan teknologi informasi untuk tata kelola pemerintahan, diantaranya sistem pengadaan barang dan jasa yang terpadu, mekanisme persuratan dan kearsipn yang berbasis teknologi, hingga peningkatan mutu layanan pelatihan yang berbasis teknologi informasi.

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 3

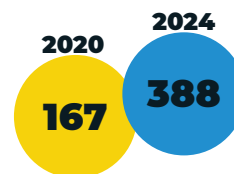
Jumlah kumulatif guru penggerak/komunitas yang terampil menerapkan pembelajaran digital



Jumlah siswa (siswa dan mahasiswa) yang memperoleh peluang kerja (pekerjaan, magang, pelatihan) melalui platform pencarian kerja online



Jumlah satker yang melaksanakan PBJ melalui e-procurement



Strategi Fokus Kesuksesan 3

Pusat data dan teknologi informasi (Pusdatin) mengembangkan bahan belajar atau konten pembelajaran berbasis digital untuk mendukung beragam program Kementerian diantaranya program merdeka belajar, belajar dari rumah, dan pembelajaran online lainnya melalui portal rumah belajar. Selain itu, pusdatin juga fokus untuk mengembangkan platform pendidikan sebagai produk yang dapat menyediakan nilai tambah untuk pengguna. Pemanfaatan teknologi menjadi sangat penting sebagai antisipasi kebutuhan dan kondisi yang terus berubah.

Pemanfaatan teknologi tidak hanya digunakan dalam hal peningkatan akses layanan pendidikan dan kebudayaan saja, namun dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, peran teknologi informasi juga sangat tinggi. Setjen sebagai koordinator fungsi administrasi Kementerian tentunya memerlukan teknologi informasi untuk memberikan layanan yang lebih maksimal, salah satu sistem yang dikembangkan adalah Sistem Perencanaan Barang dan Jasa (SIRENBAJA) untuk pengadaan barang dan jasa.

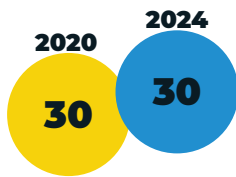
Penumbuhan karakter untuk mewujudkan pelajar Pancasila

4

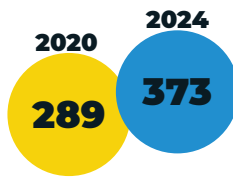
Sejalan dengan komitmen Kemendikbud untuk menciptakan Pelajar Pancasila dengan 6 (enam) ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME dan berakhlak mulia, berkebhinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif, maka dibutuhkan sebuah mekanisme atau gerakan penumbuhan karakter sehingga profil pelajar Pancasila dapat terwujud.

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 4

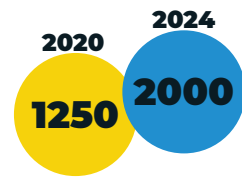
Jumlah konten penguatan karakter satuan pendidikan yang dihasilkan dan disebarluaskan



Jumlah peserta didik yang mengikuti kompetisi internasional



Jumlah masyarakat yang melaksanakan budaya sensor mandiri



Strategi Fokus Kesuksesan 4

Penyebarluasan konten kepada satuan pendidikan, keluarga dan masyarakat dikoordinasikan oleh pusat penguatan karakter. Konten-konten tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat atas konsep merdeka belajar sekaligus juga meningkatkan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Sejalan dengan Pusat prestasi nasional yang mendukung fasilitasi peserta didik dan satuan pendidikan untuk mengikuti beragam kompetisi baik nasional maupun internasional sehingga diharapkan dapat meningkatkan daya juang dan

karakter pserta didik untuk dapat dikembangkan dan dimasukkan dalam managemen talenta.

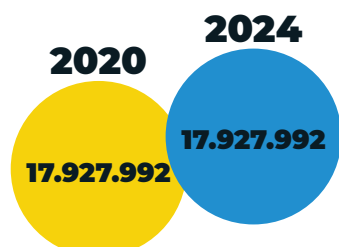
Sekretariat Lembaga Sensor Film (LSF) melalui gerakan nasional sensor mandiri diharapkan dapat meningkatkan budaya sensor mandiri sehingga masyarakat luas dapat menikmati film dan iklan film sesuai kategori dan menghindarkan masyarakat dari dampak negatif yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai.

5 Perluasan akses pendidikan berkualitas bagi seluruh peserta didik melalui mekanisme pembiayaan pendidikan

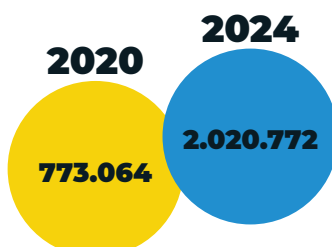
Penyediaan akses pendidikan khususnya bagi peserta didik miskin/rentan miskin dan/atau berprestasi untuk mendapatkan pendidikan yang merata dan berkualitas melalui Program Indonesia Pintar dan Beasiswa Unggulan.

Indikator Kinerja Fokus Kesuksesan 1

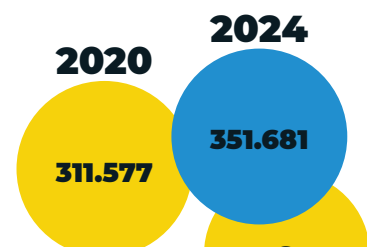
Jumlah siswa yang memperoleh KIP-Dikdasmen



Jumlah mahasiswa yang memperoleh KIP-Kuliah



Jumlah guru dan tenaga kependidikan Non-PNS yang memperoleh tunjangan/insentif



Strategi Fokus Kesuksesan 5

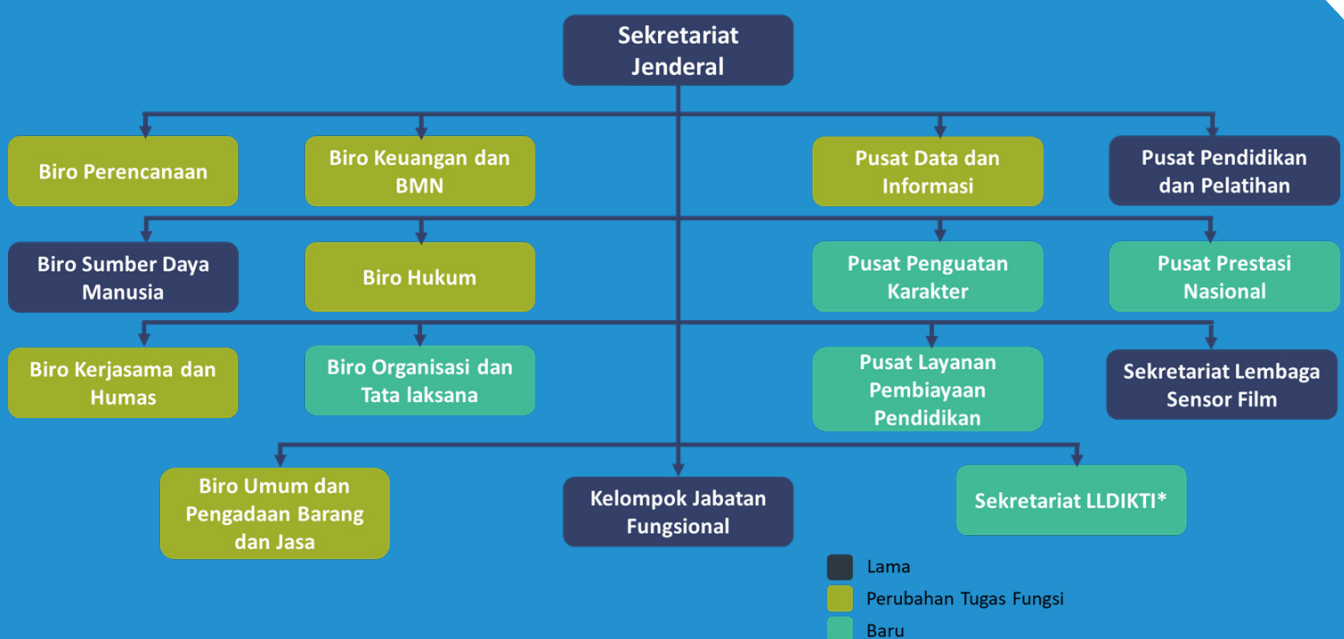
Pusat layanan pembiayaan pendidikan berkomitmen untuk menciptakan kepastian belajar mengajar bagi peserta didik dan pendidik melalui layanan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran dan terpadu, oleh karenanya puslapdik membangun integrasi SIM aneka bantuan dan tunjangan layanan pembiayaan pendidikan.

Kerangka Kelembagaan Setjen

Struktur Organisasi

Guna mendukung ketercapaian strategi kesuksesan Sekretariat Jenderal dibutuhkan struktur organisasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat Jenderal Kemendikbud merupakan unsur pembantu pimpinan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Unit organisasi Eselon I Kemendikbud ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Sekretariat Jenderal Kemendikbud terdiri dari 14 unit kerja dengan rincian 7 Biro, 5 Pusat, dan 2 Sekretariat. Struktur Organisasi Setjen dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Kemendikbud



Berdasarkan Permen SOTK Kemendikbud tersebut, Sekretariat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat Jenderal menyelenggarakan fungsi:

Koordinasi kegiatan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana

Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum

Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Mengingat tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal Kemendikbud bertanggung jawab atas seluruh aspek manajemen internal Kemendikbud. Selain itu, Sekretariat Jenderal berperan sebagai “penyedia layanan umum” bagi seluruh unit kerja Kemendikbud; sekaligus sebagai “simpul penghubung” antar unit utama serta antara Kemendikbud dengan lembaga eksternal lainnya.

Gambaran Unit-unit Kerja di bawah Setjen

Seluruh unit kerja Kemendikbud (Eselon I, II, Satker dan PTN)

Internal



Biro Perencanaan

Melakukan proses perencanaan dan penganggaran

Sinkronisasi dan analisis kebijakan pusat dan daerah

Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran

Melakukan Pembinaan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Bappenas, Kementerian Keuangan, KemenPAN RB, Pemerintah Daerah

Eksternal

Biro Keuangan dan Barang Milik Negara

Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah

Meningkatkan kualitas inventarisasi dan pelaporan Barang Milik Negara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang efektif dan efisien



Internal

Seluruh unit kerja Kemendikbud (Eselon I, II, Satker dan PTN)

Eksternal

Kementerian Keuangan, BPK

Seluruh unit kerja Kemendikbud dan Seluruh SDM Kemendikbud

Internal



Biro Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Kemendikbud

Kemenpan RB, dan BKN

Eksternal

Biro Organisasi dan Tata Laksana

Layanan dan fasilitasi pelembagaan unit organisasi (evaluasi organisasi melalui aplikasi Sievo)



Internal

Seluruh unit kerja Kemendikbud (Eselon I, II, Satker dan PTN)

Eksternal

KemenPAN RB, Pemda

Seluruh unit kerja Kemendikbud dan Seluruh SDM Pendidikan

Internal



Biro Hukum

Koordinasi, sinkronisasi, pengkajian dan penyusunan peraturan perundang-undangan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Penelaahan kasus dan masalah hukum serta pemberian advokasi hukum

Masyarakat, Pemda, Aparat Hukum

Eksternal

Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat

Koordinasi kerja sama bidang pendidikan dan kebudayaan

Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan kebudayaan di Luar Negeri

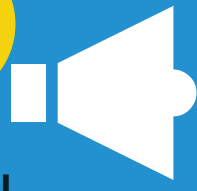
Layanan informasi dan publikasi program, kebijakan Kemendikbud kepada pemangku kepentingan.

Seluruh unit kerja Kemendikbud

Internal

Lembaga Multilateral, Kedutaan, Ormas, Masyarakat

Eksternal



Biro Umum Pengadaan Barang dan Jasa

Melakukan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.

Melakukan pembinaan dan pengelolaan persuratan dan kearsipan.



Internal

Seluruh unit kerja Kemendikbud

Eksternal

LKPP, Kementerian Keuangan, ANRI, Pemda, Satuan Pendidikan

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan

Pembiayaan Pendidikan kepada peserta didik melalui Program Indonesia Pintar Pendidikan Dasar dan menengah dan Pendidikan Tinggi.

Pembiayaan Pendidikan kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan melalui aneka tunjangan (Tunjangan Profesi Guru non PNS, Tunjangan Khusus Guru, dan Insentif guru non PNS)

Ditjen PAUD-Dasmen, Vokasi dan Dikti

Internal



Eksternal

Peserta Didik, Guru dan Tenaga Kependidikan, Satuan Pendidikan

Pusat Data Dan Teknologi Informasi

Penyediaan platform digital pendidikan untuk mendukung pembelajaran berbasis TIK

Pengelolaan dan pendayagunaan data dan statistic Urgensi SPBE



Internal

Ditjen PAUD-Dasmen, Vokasi dan Dikti

Eksternal

Kemenkeu, Bappenas, Mitra Pembangunan, Lembaga Riset Peserta Didik, Guru, Masyarakat

Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai

Dukungan Pendidikan dan Pelatihan (Pelatihan Kepemimpinan, Dasar, Teknis, Fungsional, dan Sosial-Kultural)

Seluruh unit kerja Kemendikbud

Internal



Eksternal

BPIP, Pemerintah Daerah, Mitra Pembangunan Masyarakat

Ditjen
PAUD-Dasmen,
Vokasi dan Dikti

Internal



Pusat Prestasi Nasional

Fasilitasi lomba nasional dan internasional untuk jenjang Pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi

Fasilitasi dalam pengembangan siswa/l yang memiliki talenta

Peserta Didik,
Organisasi
Masyarakat,
Diaspora

Eksternal

Pusat Penguatan Karakter

Membuat konten kampanye penguatan karakter

Melakukan survei penguatan karakter



Internal

Seluruh
unit kerja
Kemendikbud

Eksternal

BPIP, Pemerintah
Daerah, Mitra
Pembangunan
Masyarakat

Ditjen Kebudayaan
Pusat
Pengembangan
Karakter

Internal



Sekretariat Lembaga Sensor Film

Perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negative yang timbul dari peredaran dan pertunjukan film dan iklan film yang tidak sesuai dengan dasar, arah dan tujuan perfilman Indonesia (pensoran film)

Eksternal

Insan dan Industri
Perfilman, Media
Massa, Masyarakat

Sekretariat Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi

Dukungan Administrasi Layanan Pendidikan Tinggi



Internal

Ditjen Dikti,
PTN

Eksternal

Mahasiswa, PTS,
BAN-PT

Kerangka Pendanaan

Dalam rangka memenuhi target kesuksesan, dibutuhkan

sumber pendanaan yang berasal dari APBN dengan rincian sebagai berikut:

Program/Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Layanan prima dalam Pengadaan dan Penataan BMN serta Sarana Prasarana Kementerian	37.732				
Peningkatan Layanan Prima di bidang Hukum	41.072	40.626	42.658	44.791	47.030
Peningkatan Efektivitas, Pengelolaan dan Pembinaan ASN	52.500	47.425	49.796	52.286	54.900
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Pengelolaan Anggaran dan BMN	153.301	155.753	163.540	171.718	180.303
Peningkatan Layanan Prima dalam Perencanaan, Anggaran dan Akuntabilitas Kinerja	160.729	108.541	113.968	119.666	125.649
Peningkatan Layanan Prima dalam menunjang Fungsi Pelayanan Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa	307.132	433.183	454.842	477.584	501.463
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Organisasi dan Tata Laksana	19.200	27.626	29.007	30.457	31.980
Peningkatan Layanan Prima di Bidang Kerja Sama dan Kehumasan	326.530	418.175	439.084	461.038	484.090
Penyediaan data dan statistik serta pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi untuk pendidikan dan kebudayaan	340.120	382.504	401.630	421.711	442.797
Pengembangan Pendidikan Sains dan Kerja Sama di Kawasan Asia Tenggara	86.304	86.318	90.634	95.166	99.924
Peningkatan Sensor Film dan Iklan Film	38.750	44.369	46.587	48.917	51.363
Layanan Pembiayaan Pendidikan	19.828.218	28.098.526	29.503.453	30.978.625	32.527.557
Sekretariat Jenderal					
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	22.067.563	30.823.529	32.364.706	33.982.941	35.682.088

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Setjen Kemendikbud 2020-2024 ini diharapkan dapat menjadi arahan bagi unit kerja Setjen dalam mengembangkan program dan anggaran selama periode perencanaan ini.

Kerangka kesuksesan beserta strategi kunci yang tercantum dalam Renstra Setjen ini diharapkan memberikan gambaran skala prioritas dan arah perubahan Setjen Kemendikbud sehingga implementasi program dan anggaran bisa lebih terarah, selaras dan efektif dan efisien.

Renstra ini telah disusun dengan mengacu berbagai prioritas pemerintah, prioritas Menteri, dan arahan Sekretaris Jenderal Kemendikbud. Namun perencanaan ini tidak bersifat ketat, untuk memberi ruang bagi hal-hal yang bersifat mendesak dan perlu, sesuai dengan

arah kebijakan pemerintah. Kondisi Pandemi COVID-19 menjadi pemelajaran tentang pentingnya kebijakan yang bersifat responsif.

Disadari bahwa kesuksesan Sekretariat Jenderal akan membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak, baik di dalam lingkungan Kemendikbud, Kementerian dan Lembaga lain di pusat dan daerah, serta masyarakat. Kerja keras dari seluruh jajaran Sekretariat Jenderal dan sinergi dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan tujuan, kesuksesan, dan program prioritas Sekretariat Jenderal.

Renstra Setjen ini diakhiri dengan dua dokumen lampiran: (1) Matriks Kinerja Detail Sekretariat Jenderal; (2) Matriks Pendanaan Detail Sekretariat Jenderal. Kedua lampiran ini dapat digunakan sebagai acuan detail penyusunan Program, Anggaran, dan Laporan Kinerja Sekretariat Jenderal.



**SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
2020**